

**LAPORAN KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH POLEWALI MANDAR
2026**

LAPORAN EVALUASI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

I. PENDAHULUAN

Laporan Evaluasi Tingkat Kematangan Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan data hasil pengukuran institusional terhadap 28 Perangkat Daerah / Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Evaluation framework ini mengukur tingkat kesiapan dan kualitas tata kelola organisasi melalui 11 Indikator/Variabel Utama, yang mencakup aspek perencanaan, standar pelayanan publik, pemetaan risiko, hingga pengembangan kapasitas SDM aparatur.

II. GAMBARAN UMUM HASIL EVALUASI

Secara keseluruhan, rata-rata skor kematangan Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar mencapai 37.61 (berada dalam kategori Tingkat Kematangan Tinggi). Ringkasan indikator utama adalah sebagai berikut:

1. Total Perangkat Daerah Dievaluasi: 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
2. Rata-Rata Skor Kematangan Kabupaten: 37.61 (Kategori Tingkat Kematangan Tinggi)
3. Sebaran Peringkat Kematangan OPD sebagai berikut.
 - a. Tingkat Kematangan Sangat Tinggi: 4 Perangkat Daerah (14.3%)
 - b. Tingkat Kematangan Tinggi: 12 Perangkat Daerah (42.9%)
 - c. Tingkat Kematangan Sedang: 6 Perangkat Daerah (21.4%)
 - d. Tingkat Kematangan Rendah: 6 Perangkat Daerah (21.4%)

III. REKAPITULASI HASIL KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi hasil evaluasi tingkat kematangan dari 28 Perangkat Daerah, diurutkan dari skor tertinggi hingga terendah, sebagai berikut

No	Perangkat Daerah / Unit Kerja	Skor Akhir	Peringkat Kematangan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54	Tingkat Kematangan Sangat Tinggi
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51	Tingkat Kematangan Sangat Tinggi
3	Badan Pendapatan	50	Tingkat Kematangan Sangat Tinggi
4	Dinas Pertanian dan Pangan	49	Tingkat Kematangan Sangat

			Tinggi
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Perencanaan	44	Tingkat Kematangan Tinggi
6	Satuan Polisi Pamong Praja	44	Tingkat Kematangan Tinggi
7	Dinas Sosial	44	Tingkat Kematangan Tinggi
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42	Tingkat Kematangan Tinggi
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42	Tingkat Kematangan Tinggi
10	Inspektorat	41	Tingkat Kematangan Tinggi
11	Dinas Kesehatan	41	Tingkat Kematangan Tinggi
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40	Tingkat Kematangan Tinggi
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	40	Tingkat Kematangan Tinggi
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM	40	Tingkat Kematangan Tinggi
15	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	39	Tingkat Kematangan Tinggi
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	39	Tingkat Kematangan Tinggi
17	Sekretariat DPRD	35	Tingkat Kematangan Sedang
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35	Tingkat Kematangan Sedang
19	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	34	Tingkat Kematangan Sedang
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32	Tingkat Kematangan Sedang
21	Dinas Perhubungan	32	Tingkat Kematangan Sedang
22	Badan Keuangan	29	Tingkat Kematangan Sedang
23	Sekretariat Daerah	28	Tingkat Kematangan Rendah
24	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	28	Tingkat Kematangan Rendah

25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27	Tingkat Rendah	Kematangan
26	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25	Tingkat Rendah	Kematangan
27	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM	25	Tingkat Rendah	Kematangan
28	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Tingkat Rendah	Kematangan

IV. ANALISIS KINERJA VARIABEL / INDIKATOR

Evaluasi dilakukan terhadap 11 variabel tata kelola yang berdasarkan hasil pengolahan data. Performa variabel unggul dan variabel yang memerlukan perbaikan kritis, sebagai berikut :

1. Indikator Unggul (Rata-Rata Skor > 3.5)

- Pengukuran kinerja perangkat daerah dan aparatur dengan rata-rata 4.18 merupakan mayoritas Perangkat Daerah telah memiliki sistem penilaian kinerja yang terstruktur dan terukur secara konsisten.
- Perencanaan pembangunan daerah dengan rata-rata 4.11 yang terdiri dari integrasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah terhadap prioritas pembangunan daerah tergolong sangat kuat.
- Monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas dengan rata-rata 3.82 memperhitungkan mekanisme pengawasan operasional dan evaluasi berkala berjalan dengan baik.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dengan Rata-rata: 3.57 terdiri atas penyusunan dan penerapan SOP pelayanan publik rata-rata tertata rapi.
- Manajemen risiko pelaksanaan tugas dengan rata-rata 3.54 merupakan pengidentifikasian dan mitigasi risiko operasional yang telah terpetakan dengan baik pada Perangkat Daerah papan atas.

2. Indikator Kritis / Area Perbaikan Untuk Ditingkatkan (Rata-Rata Skor < 3.0)

- Pendidikan dan pelatihan aparatur dengan rata-rata 2.21 merupakan variabel dengan skor terendah nasional/daerah. Banyak OPD berada di Tingkat I/II yang mencerminkan minimnya keterenuhan jam pelajaran (JP) diklat/pengembangan kompetensi ASN.

- b. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas dengan rata-rata 2.79 kapasitas penyusunan *policy paper*, kajian akademis, dan formulasi berbasis data masih relatif terbatas di tingkat Perangkat Daerah.
- c. **Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja (Rata-rata: 3.07):** Pengelolaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana prasarana kerja yang terukur belum merata di seluruh instansi.

V. CATATAN KHUSUS DAN TEMUAN EVALUASI

Kesenjangan Kematangan Lembaga Sekretariat/Penunjang: Sekretariat Daerah (Skor: 28) dan Badan Keuangan (Skor: 29) berada pada kategori Rendah/Sedang. Hal ini didorong oleh rendahnya capaian pada indikator Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta Pengembangan Inovasi. Sebagai poros koordinasi, pembenahan internal Sekretariat Daerah perlu diprioritaskan.

VI. REKOMENDASI STRATEGIS

- Akselerasi Diklat dan Pengembangan Kompetensi ASN: BKPSDM/BKPP perlu merancang program percepatan pemenuhan minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun bagi seluruh aparatur di OPD yang meraih skor diklat rendah.
- Pendampingan Khusus OPD Berpredikat Rendah: Melakukan pembinaan dan asistensi intensif oleh Bagian Organisasi dan Inspektorat terhadap 6 OPD kelompok bawah (DLHK, DP2AKBP3A, Distransnaker, DPK, Disrumkimtan, Setda).
- Replikasi Best Practice: Mendorong OPD berpredikat Sangat Tinggi (Disdukcapil, Disdikbud, Bapenda, Dinas Pertanian) untuk menjadi role model dan pembina bagi OPD lainnya dalam penguatan tata kelola.

Polewali, 27 Juli 2026
Sekretaris Daerah



Nursaid S.Sos, MM